

POTENSI DUKUNGAN BUDAYA NASIONAL BAGI REFORMASI SOSIAL-POLITIK

Oleh Nurcholish Madjid

Rasanya memang tepat bahwa pada saat sekarang kita mulai mengadakan reformasi sosial-politik bagi negara kita dan kaitannya dengan masalah ketahanan bangsa kita dalam era globalisasi yang mesti terjadi, bahkan sekarang sudah mulai terjadi. Masalah ketahanan itu sendiri sangat erat terkait dengan seberapa jauh kita mampu menindaklanjuti akibat-akibat logis perkembangan terakhir bangsa kita. Jika berhasil, maka akan punya dampak positif pada ketahanan bangsa di segala bidang. Jika gagal, maka sebaliknyalah yang mungkin terjadi, yaitu hancurnya keutuhan dan jati diri bangsa, sebagaimana diperlihatkan secara dramatis oleh bangsa-bangsa Eropa Timur, lebih-lebih lagi oleh bekas bangsa dan negara Yugoslavia yang hancur berantakan. Maka tesis utama pembahasan di bagian ini cukup sederhana: bangsa Indonesia akan tetap bertahan dan tetap jaya jika mampu memberi responsi pada logika perkembangan historisnya sendiri, dan akan hancur berantakan jika gagal.

Tindak lanjut untuk tahap pertumbuhan logis bangsa telah diisyaratkan oleh berbagai aspirasi reformasi sosial-politik yang muncul dengan keras akhir-akhir ini. Berbagai agenda reformasi politik telah menjadi unsur bahan berita menonjol saat ini. Semua itu mengacu pada hasrat yang lebih kuat dari masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara lebih aktif, dan perasaan tidak

cukup hanya dengan partisipasi pasif seperti yang selama ini telah berlangsung. Keseluruhan aspirasi itu tersimpulkan dalam makna ungkapan yang saat ini semakin membahana di angkasa dunia pemikiran politik Indonesia, yaitu demokrasi dan demokratisasi.

Setiap kemajuan tentu melibatkan eksperimentasi, dan setiap eksperimentasi melibatkan proses-proses coba dan salah (*trial and error*). Karena hal itu sudah merupakan suatu kemestian yang tidak mungkin ditolak atau dihindarkan, maka sikap menentang kepadanya dapat sepadan dengan menentang hukum alam. Jadi pasti gagal. Dan karena tentu ada unsur kesalahan, besar atau kecil, dalam setiap eksperimentasi, maka menghindari atau menghalangi proses itu karena takut salah akan justru merupakan kesalahan yang lebih gawat. Sebab dalam jangka panjang dampak perusakannya terhadap tatanan sosial-politik nasional akan lebih besar daripada sebuah eksperimentasi yang mengandung kekeliruan.

Tapi agaknya persoalan bukanlah pada *trial and error* itu sendiri. Suatu eksperimentasi yang jauh lebih banyak segi salahnya daripada segi betulnya tentu tidak dapat diteruskan, sebab madaratnya akan menjadi lebih besar daripada manfaatnya. Dalam hal ini yang paling banyak diperselisihkan agaknya ialah kenisbian “lebih banyak” dan “lebih sedikit” itu. Perselisihan serupa kerap kali berujung pada usaha menghalangi dan menyetop eksperimentasi, khususnya jika pihak penguasa sudah merasa “terancam”.

Budaya Nasional: Pola Pesisir

Ketika pada awal 1960-an melantik Resimen Mahajaya (Mahasiswa Jakarta Raya), Presiden Sukarno menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan sikapnya yang menolak gagasan memindahkan ibukota Republik dari Jakarta ke suatu kota lain, baik di Jawa ataupun di Luar Jawa. Alasannya ialah bahwa sampai dengan saat itu (mungkin sampai sekarang?) di negeri kita ini baru ada satu kota Indonesia (yakni, kota yang berbudaya mencakup seluruh

unsur budaya Indonesia), yaitu Jakarta. Kota-kota lain, betapa pun besarnya, masih menunjukkan ciri utama sebagai kota daerah. Pandangan Bung Karno kala itu memantulkan pendapat bahwa suatu budaya yang meliputi seluruh wilayah Indonesia (sebutlah suatu “Keindonesiaan”) sesungguhnya masih sedang dalam proses pertumbuhannya, dan belum mencapai titik akhir pertumbuhan itu. Ini berarti bahwa budaya Indonesia masih belum dapat ditunjuk langsung secara nyata. Namun merupakan suatu kebetulan yang amat baik bahwa kosmopolitanisme ibukota negara telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis meliputi seluruh “universum” tanah air Indonesia. Untuk menambah segi positif itu, primordialisme kesukuan di ibukota lebih mirip keanehan daripada kewajaran suatu kehidupan antaretnis dalam satu tempat. Setiap orang merasa *at home* atau *kerasan* dengan suasana kosmopolit yang mencakup seluruh suku, daerah, bahasa ibu, budaya lokal, dan lain-lain. Jakarta menjadi “*melting pot*” budaya Indonesia yang efektif. Dalam perenungan kembali, Bung Karno dalam sikapnya tadi tepat dan benar.

Walaupun begitu, tidaklah berarti bahwa proses pertumbuhan Keindonesiaan itu terbatas hanya di Jakarta, dan berlangsung hanya dalam kurun waktu tertentu seperti masa-masa dekat sebelum dan sesudah Proklamasi. Telah menjadi argumen para pendiri Republik bahwa gagasan-gagasan mereka tentang Indonesia dan Keindonesiaan mempunyai akar-akar yang jauh dalam sejarah Nusantara. Warna bendera merah putih, misalnya, diyakini sebagai telah digunakan bangsa-bangsa Nusantara sejak lama sekali di masa-masa silam. Setidaknya sudah sejak kedatangan Islam di Jawa ada tradisi memperingati dua cucu Nabi Muhammad *saw*, Hasan dan Husain, dengan hidangan bubur dua warna, merah dan putih pada setiap tanggal sepuluh Muharram. (Tanggal itu dalam istilah Arab disebut ‘*Asyūrā*’ yang dijawabkan menjadi “Suro”). Warna merah untuk Husain yang gagah berani dan menjadi pahlawan kaum kecil di Padang Karbala. Warna putih untuk Hasan yang berpembawaan damai dan mendamaikan semua unsur dalam masyarakat.

Lebih penting daripada bendera sebagai lambang kebangsaan, budaya Indonesia atau bibit-bibitnya telah dibentuk oleh kemestian lingkungan fisik geografisnya sebagai negara kelautan (maritim) terbesar di muka bumi. Dengan jumlah kepulauan yang fantastis (konon 17.000 pulau, besar-kecil), Indonesia memiliki jumlah kilometer panjang pantai yang tertinggi di dunia. Sifat dan jiwa dasar kemaritimannya yang amat menonjol itu menghasilkan berbagai gejala sosial-politik yang amat penting, yaitu bahwa (proto) bangsa Indonesia mencapai kebesaran dan puncak kejayaannya ketika mereka tampil secara sosial-politik sebagai kerajaan maritim, yaitu Sriwijaya kemudian Majapahit. Sebaliknya, (proto) bangsa Indonesia mengalami kemunduran kemudian kehancuran ketika suku-suku yang ada, dalam sosial-politik menjadi bersifat melihat ke dalam, ke pola-pola budaya pedalaman seperti yang ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan Jawa pedalaman. Indonesia adalah kelanjutan wajar dari pertumbuhan sekumpulan suku-suku bangsa di kawasan Asia Tenggara (atau Asia Kepulauan) ini dengan sifat dan jiwa dasar kemaritimannya tersebut. Meskipun dari segi struktural dan institusional modern peranan pemerintahan Hindia Belanda cukup penting, namun yang lebih menentukan bagi pertumbuhan Keindonesiaan ialah benih-benih pola budaya yang bersemangat kemaritimannya, dengan ciri-ciri utama keterbukaan, persamaan manusia, mobilitas tinggi, dan kosmopolitanisme. Terutama ciri kosmopolitanisme itu amat penting, karena mobilitas yang tinggi membuat para warga menjadi anggota berbagai kelompok sosial-budaya dalam berbagai tempat dan daerah, sehingga berdampak perataan jalan bagi tumbuhnya semangat kebangsaan atas dasar kesadaran persamaan budaya dan, kemudian, juga nasib (seperti pengalaman penjajahan).

Melandasi itu semua ialah wawasan kultural bersumberkan agama. Melihat dampaknya yang menyeluruh bagi kawasan ini, agama-agama Budha dan Hindu ikut berjasa besar untuk pertumbuhan budaya Indonesia. *Pertama*, ialah agama Budha yang menjadi agama kerajaan Sriwijaya di Sumatera, yang pengaruh

kekuasaan maritimnya telah meninggalkan bekas yang amat penting, yaitu (proto) bahasa Melayu, sehingga menjadi bahasa pergaulan atau *lingua franca* kawasan Asia Tenggara. *Kedua*, ialah agama Hindu, yang melalui Majapahit telah melandasi suatu pola budaya kosmopolitan. Sifat kemaritiman Majapahit telah menciptakan suatu universum yang jangkauannya kurang-lebih sama atau sebanding dengan Indonesia modern. *Ketiga*, ialah Islam. Sifat budaya Islam yang bersumbukan kosmopolitanisme pola ekonomi dagang ternyata sangat sesuai dengan suasana sosio-kultural Asia Tenggara, khususnya kawasan Melayu. Kesesuaian itu menghasilkan proses Islamisasidunia Melayu sedemikian cepat, sehingga agama-agama Budha dan Hindu terdesak.

Melalui perkembangan Islam di kawasan ini terjadilah interaksi saling meneguhkan antara agama Islam dan bahasa Melayu. Agama Islam yang punya reputasi ke mana-mana mengembangkan tradisi tulis-menulis telah membuat bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa yang kaya dan canggih dengan kemampuan besar sebagai alat komunikasi regional. “Simbiose mutualistis” antara Islam dan bahasa Melayu karena kesejajaran sifat-sifat dasar antara keduanya sekitar egalitarianisme, mobilitas tinggi, kosmopolitanisme, dan keterbukaan telah menghasilkan struktur sosial budaya yang kukuh. Karena itu bukanlah suatu hal kebetulan semata bahwa para perintis Republik, terutama melalui Kongres Pemuda 1928, telah memilih bahasa Melayu sebagai dasar bahasa nasional. Pertimbangan teknis-operasional untuk jatuhnya pilihan pada bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Nasional (karena keberhasilan bahasa itu sebagai *lingua franca* kawasan ini) tentu amat penting. Tetapi, disadari atau tidak, jatuhnya pilihan kepada bahasa Melayu itu (dengan mengesampingkan, misalnya, bahasa Jawa yang secara literer jauh lebih kaya), mencerminkan suatu wawasan dasar sosio-kultural para perintis Republik. Yaitu bahwa mereka menginginkan suatu Indonesia yang dinamis, egaliter, terbuka, kosmopolit dengan mobilitas tinggi, sejalan dengan wawasan kenegaraan demokratis modern.

Gerak Pendulum Pesisir-Pedalaman

Itu semua terutama merupakan sifat dasar budaya pola pesisir. Karena itu dukungan linguistik dan kultural kepada wawasan kenegaraan serupa itu ada dalam jiwa dan watak dasar bahasa Melayu, khususnya setelah mengalami Islamisasi, dan tidak dalam bahasa-bahasa lain di Nusantara ini. Jadi keputusan untuk memilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasional tidak saja merupakan keputusan kebahasaan, tapi juga keputusan kebudayaan dan wawasan sosial-politik. Hasilnya ialah wawasan-wawasan modern kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sebagaimana secara resmi termuat dalam UUD 45, terutama mukaddimahnya, juga batang-tubuhnya. Jadi sesungguhnya konsep kenegaraan Indonesia dan budaya Keindonesiaan itu sendiri dibuat berdasarkan semangat budaya pola pesisir yang lebih demokratis, bukan budaya pedalaman yang feodal.

Namun dengan sendirinya budaya pola pesisir berkembang tidak tanpa tantangan. Seperti hancurnya Sriwijaya di Sumatera yang kemudian dilanjutkan dengan Mataram Kuna di Jawa Tengah, dan runtuhnya Majapahit di Jawa Timur yang kemudian dimetamorfosekan secara berliku-liku dan muncul menjadi Mataram (kedua), juga di Jawa Tengah, tarik-menarik antara pola pesisir dan pola pedalaman itu terus berlangsung dalam masa Indonesia Merdeka. Meskipun secara serempak Indonesia dirancang sebagai sistem politik gaya budaya pola pesisir (yang antara lain melalui bahasa Melayu dicerminkan dalam hampir semua *nomenklatur* perpolitikan kita yang dipinjam dari bahasa Arab), namun setiap kali terjadi usaha konsolidasi pemerintahan terjadi semacam pergeseran wawasan budaya dari pola pesisir ke pola pedalaman. Secara simbolik pergeseran itu tercermin dalam dipaksakannya istilah-istilah sosial-politik dan kenegaraan yang diambil dari bahasa Sanskerta, seperti jelas pada nama-nama hadiah nasional semisal istilah “Sam Karya Nugraha”, dan lain-lain.

Di satu pihak hal ini mempunyai logikanya sendiri, yaitu karena dari kedua pola budaya itu, kalangan pendukung pola pedalaman

lebih mempunyai kesiapan menjalankan kekuasaan pemerintahan melalui birokrasi dan administrasi kenegaraan. Para pendukung budaya pola pesisir umumnya, diukur dari standar pendidikan modern (kolonial), tingkat kemampuan teknis birokratik dan administratifnya rendah. Maka pada setiap kali proses konsolidasi Republik mereka dengan sendirinya “tidak dapat ikut serta”, bahkan sengaja disingkirkan melalui proses diskualifikasi. Karena proses-proses tersebut maka pada masa Orde Baru, kita menyaksikan sebuah Indonesia yang dalam banyak hal didominasi oleh budaya pola pedalaman. Bahkan hal itu terus terlihat pada masa sekarang ini, pasca Orde Baru. Gejala diperkenalkannya kembali unsur-unsur pandangan hidup feodal — seperti dapat disaksikan pada “budaya kantor” atau “budaya pejabat” kita, dan yang secara mencolok dipamerkan dalam semangat upacara-upacara resepsi perkawinan adat yang mewah dan mahal-adalah bagian dari hasil tarik-menarik antara kedua pola dengan kemenangan pola pedalaman. Dinilai dari sudut pertimbangan aspirasi para perintis Republik, dominasi budaya pola pedalaman itu dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyimpangan. Karena itu juga dirasakan sebagai tidak sejalan, kadang-kadang bahkan bertentangan, dengan naluri kebangsaan yang lebih “orisinil” Indonesia, berdasarkan budaya pola pesisir. Dengan kata lain, dominasi unsur feodal dari budaya pola pedalaman adalah suatu anomali bagi wawasan dan cita-cita Keindonesiaan.

Sudah tentu pertumbuhan Keindonesiaan tidak berhenti pada tahap perkembangan itu. Pendulum masih terus berayun ke kanan dan ke kiri, dengan eksesekstremitas-ekstremitas yang kerap kali kuat terasa. Jika pada ujung salah satu dari ekstremitas gerak pendulum itu sedang tampil reintroduksi unsur-unsur feodalisme yang hirarkis, pada ujung lainnya kita kini sedang menyaksikan langkah-langkah ofensif bahasa Nasional — bahasa Indonesia yang berdasarkan bahasa Melayu itu — untuk mengikis hampir habis peran kultural bahasa-bahasa daerah: Dalam hal ini bahasa Jawa adalah yang paling menderita, sehingga bahasa itu kini sedang

dalam proses kematiannya. Dan jiwa demokratik bahasa Nasional itu juga secara pelan-pelan namun cukup pasti sedang berproses untuk melumatkan pola-pola pedalaman yang feodalistik dalam “budaya kantor” dan “budaya pejabat”. Jadi terdapat banyak indikasi yang menjadi alasan kuat optimisme mereka yang punya perhatian (dan keprihatinan) pada Keindonesiaan modern (yang biar pun “modern” tapi justru “asli” Indonesia sejak masa perintisan kemerdekaan). Perkembangan inilah yang saat-saat ini sedang kita saksikan ekspresi keluarnya berbentuk gejala-gejala sosial-politik seperti tuntutan orang banyak untuk dapat berpartisipasi secara lebih luas dalam proses-proses pengambilan keputusan, dambaan pada tertib hukum yang lebih dapat diandalkan dan *predictable*, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan hak-hak asasi manusia, pemberdayaan rakyat dan wakil-wakil mereka, pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi (kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat), percepatan laju demokratisasi dan pelaksanaan nilai-nilai demokratis, dan seterusnya. Bertolak dari pandangan di atas, berikut ini akan dicoba membicarakan beberapa hal yang penting bagi reformasi siasal-politik sekarang ini.

Demokratisasi dan Hambatan Kekuasaan

Apakah benar di negeri kita sedang terjadi proses demokratisasi? Jawabnya jelas positif. Hal itu antara lain sebagai kelanjutan gelombang politik yang kini boleh dikata berdimensi global, yaitu kecenderungan ke arah sistem politik yang lebih terbuka. Bagi negeri kita, sama dengan negeri-negeri dengan pola pembangunan dan tingkat perkembangan yang kurang lebih serupa, proses demokratisasi itu juga merupakan akibat logis pemerataan relatif kecerdasan umum lewat sistem-sistem pendidikan yang tersedia untuk sebagian besar warga, dan kemudahan serta keterpenuhan nisbi keperluan hidup pokok lewat keberhasilan pembangunan ekonomi. Dan

negara-negara Asia Timur (atau Lembah Pasifik Barat) mungkin Singapura harus dikecualikan dari suatu hukum umum bahwa tingkat kecerdasan tertentu dan kemudahan ekonomi tertentu rakyat banyak melahirkan perkembangan kualitatif sosial-politik warga negara dalam bentuk tuntutan partisipasi yang lebih besar dan ruang kebebasan yang semakin lebar. Dari sudut pandang ini tindakan menghalangi proses-proses demokratisasi yang wajar akan dapat berarti pengingkaran atau pembendungan akibat logis pembangunan yang berhasil itu sendiri, sehingga tindakan itu menjadi setara penentangan hukum alam sosial. Oleh karena itu krisis yang diakibatkan tindakan itu dapat bersifat fatal dan berkemungkinan membatalkan hasil pembangunan itu atau mendorongnya ke belakang, ke garis kemunduran.

Karena itu, sekalipun tendensi ke arah demokratisasi merupakan sesuatu yang obyektif dan alamiah — dan ide tentang demokrasi serta demokratisasi menggaung secara global — namun sama sekali tidak berarti pasti berlangsung terus secara konsisten menurut garis logikanya sendiri. Tendensi dan proses itu dapat dicegat, ditanggguhkan, bahkan dibatalkan oleh suatu kecenderungan otokritik kalangan tertentu para pemegang kekuasaan. Gagasan-gagasan sederhana bahwa warga negara atau rakyat harus didengar suaranya dalam proses-proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, bahwa rakyat punya hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil, bahwa pemerintah harus merespon hajat rakyatnya, dan seterusnya mungkin merupakan hal-hal yang mudah mendapat kesepakatan verbal, tapi acapkali dalam pelaksanaan konkretnya menuntut “perjuangan” pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya rakyat sendiri. Karena gagasan-gagasan itu semua termasuk kategori perangkat lunak (bukan perangkat keras seperti prasarana fisik), maka argumentasi dan advokasinya pun bersifat lunak pula — seperti diisyaratkan oleh pepatah kita, “lidah tak bertulang” — dengan kemungkinan setiap orang merasa, mengaku bahkan meyakini sebagai punya gagasan yang sama dan sudah pula melaksanakannya. Karena itu, misalnya, jika tuntutan

demokratisasi dilantangkan dengan sasaran terhadap kalangan para penguasa, hampir tidak ada kalangan itu yang begitu saja melayani dan memberi respon positif, dengan dalih bahwa yang selama ini telah mereka lakukan sudah merupakan demokrasi dan bahwa sistem mereka adalah sistem yang demokratis (sekalipun mereka sendiri memberi kualifikasi demokrasi macam mana). Akibatnya ialah, pengalaman-pengalaman empirik berbagai bangsa, dan tentu saja bangsa kita termasuk di dalamnya, menunjukkan bahwa proses demokratisasi yang berhasil senantiasa dibarengi dengan fase-fase krisis tertentu di bidang kekuasaan. Dalam hal ini, proses krisis itu bersifat konstitusional atau tidak, lancar atau terhambat, lunak atau keras, damai atau berdarah, semuanya hanyalah bentuk-bentuk krisis yang bervariasi sejak dari yang semestinya dikehendaki karena ideal sampai pada yang semestinya dihindari karena pertimbangan “*cost and benefit*” yang berujung *netto* yang negatif.

Demokrasi, Masyarakat Madani (*Civil Society*), dan *Civility*

Perlambang demokrasi ialah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia. Hal ini benar-benar dapat dimengerti, karena hak untuk memberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaan merupakan metafor untuk sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Tetapi demokrasi tidaklah “bersemayam” dalam pemilu-pemilu. Jika demokrasi — sebagaimana dipahami di negeri maju — harus punya “rumah”, maka rumahnya ialah *civil society* atau “masyarakat madani”, di mana berbagai macam perserikatan; klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai, dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga-negara. Sekalipun konsep tentang *civil society* tidak dapat dianalisa secara persis, berfungsinya *civil society* jelas dan tegas ada dalam inti sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum.

Banyak yang mengatakan bahwa *icon* kecenderungan global demokratisasi ialah *civil society*. Berhadapan dengan penindasan

di Amerika Latin, Eropa Selatan dan Timur, *civil society* kerap kali dipandang berjasa dalam menghalangi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang. Walaupun begitu, *civil society* tidaklah menumbangkan pemerintahan, yang pemerintahan itu, jika dilanda korupsi merajalela dalam kalangannya sendiri dan kehilangan pijakan legitimasinya, biasanya tumbang dari dalam. *Civil society* lebih merupakan penerima manfaat (*beneficiary*) ketimbang sebuah kekuatan penghancur. Lebih dari itu, *civil society* sering diidealisasikan sebagai suatu kebaikan sempurna. Sama halnya dengan semua gejala sosial, *civil society* dapat, dan sering, punya sisi-sisi buruk. Sikap mementingkan diri sendiri, prasangka dan kebencian tidak jarang berjalan seiring dengan altruisme, sikap adil dan santun. Kiprah *civil society* yang bebas tak terkekang bukanlah suatu gagasan yang harus disambut hangat, melainkan pikiran yang sungguh mengerikan. Setiap *chaos* akan mudah menjadi dasar pembenaran tampilnya orang kuat yang hendak mengatasinya, sehingga *civil society* dengan kiprah bebas tak terkendali akan justru menciptakan lawannya sendiri, yaitu otoritarianisme seorang kuat. Di kalangan para ulama terkenal adanya ungkapan bijak, “Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain” (*hurriyat al-mar’i mahdūdah bi-hurriyah siwāh*). Ungkapan “bebas dan bertanggung jawab” terdengar kurang simpatik karena sering lebih ditekankan segi bertanggungjawabnya daripada segi bebasnya (terutama jika yang mengucapkan ialah pihak penguasa). Tetapi sebaliknya, jika yang ditekankan hanyalah kebebasan tanpa menganggap serius masalah tanggung jawab, maka yang dihasilkan ialah kekacauan. Ironisnya, kebebasan tanpa tanggung jawab itu akan segera hilang atau dirampas oleh penguasa atas nama keperluan mengatasi kekacauan.

Adanya masyarakat madani atau *civil society* mengisyaratkan identitas yang dipunyai bersama, setidaknya melalui persetujuan tidak langsung tentang garis-garis besar batas-batas pranata politik. Dengan kata lain, kewargaan, dengan hak dan tanggung jawabnya, adalah bagian utuh dari pengertian *civil society*. Kewargaan memberi landasan masyarakat madani. Sebab menjadi bagian dari keseluruhan adalah

prasyarat bagi keseluruhan itu untuk menjadi suatu masyarakat. Kalau tidak, masyarakat itu tidak mempunyai keutuhan, menjadi sekadar ibarat bejana yang penuh dengan onderdil-onderdil yang terpisah-pisah. Karena itu, pribadi dalam *civil society* diakui hak-hak dasarnya oleh negara, tapi, sebagai imbalannya, dituntut penunaian kewajiban kepada negara. Semua pemerintahan, khususnya yang otokratis, cenderung meremehkan kewargaan, dengan menuntut dukungan warga dan penampilan seremoni patriotik, namun pada saat yang sama hanya dalam ucapan menyatakan penghargaan kepada hak-hak kewargaan. Ketika negara, karena kegagalannya telah kehilangan kepercayaan warganya, kewargaan itu sendiri akan menjadi sasaran pengorbanan yang pertama. Ketika legitimasi pemerintahan runtuh, *civil society* juga terancam untuk mengalami fragmentasi. Karena itulah tidak punya makna apa-apa membicarakan *civil society* tanpa negara yang tangguh.

Civil society adalah lebih daripada sekadar campuran berbagai bentuk asosiasi. Pengertian *civil society* juga mengacu pada kualitas *civility*, yang tanpa itu lingkungan hidup sosial akan hanya terdiri dari faksi-faksi, klik-klik, dan serikat-serikat rahasia yang saling menyerang. *Civility* mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial; juga kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah. Dan penting sekali diperhatikan ada-tidaknya *civility* itu dalam diri serikat-serikat yang ada, selain dalam hubungan antara berbagai serikat itu satu sama lain. Ironisnya, kelompok-kelompok yang memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai terpuji lainnya kerap kali tidak mencerminkan nilai-nilai itu dalam diri kalangan mereka sendiri ataupun pribadi para tokohnya. Malangnya, *civility* adalah suatu mutu yang banyak hilang di negara-negara berkembang. Mungkin suatu negara menjunjung tinggi kehidupan keserikatan (*associational life*) yang aktif, tapi cukup sering di negara itu *civil society* dirongrong oleh kurangnya toleransi politik dan terkekang oleh peraturan pemerintah yang

sewenang-wenang. Tidak adanya *civility* menimbulkan sikap ragu tentang prospek jangka pendek demokrasi dalam suatu negara. Tetapi jika seni berasosiasi dapat dimengerti dengan baik, maka peningkatan *civil society* akan menjadi bermakna lebih daripada sekadar menciptakan dasar-dasar demokrasi. Ia sendiri menjadi milieu bagi kehidupan sosial yang sehat.

Hak Asasi Manusia dan Gerakan Masyarakat Madani

Ketika kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan muncul, biasanya tampil dalam bentuk gerakan pembela hak-hak asasi dan perbaikan harkat atau *dignity* kaum lemah atau tersisih. Gerakan seperti itu dengan sendirinya menegaskan klaim moral yang asasi, yaitu harkat kemanusiaan universal dan persamaan semua orang. Karena klaim demikian itu benar-benar mendasar, maka tidak mudah ditolak atau disanggah terang-terangan oleh para pemegang kekuasaan negara, di mana saja seluruh dunia. Akibatnya, gerakan hak-hak asasi dan perbaikan harkat kaum lemah boleh jadi menikmati kebebasan berkiprah yang lebih besar daripada kekuatan-kekuatan oposisi atau kelompok-kelompok yang menghendaki pembagian kembali sumber-sumber daya ekonomi melalui tuntutan pemerataan, misalnya. Gerakan hak-hak asasi dan pembelaan martabat kaum lemah juga mungkin lebih kebal dari kooptasi, karena tuntutan mereka mungkin tidak mudah ditebus, dibayar atau disuap dengan hak-hak istimewa atau *previlisi* tertentu, kedudukan, atau uang untuk pribadi-pribadi para pejuangnya.

Meskipun unsur-unsur masyarakat madani boleh jadi berdiri tegak sebagai oposisi terhadap pemerintah, pemerintah sendiri tidak boleh melupakan peran pokoknya selaku wasit, pembuat aturan dan penertib masyarakat madani. Sebab masyarakat madani atau *civil society* itu, bagaimanapun, bukanlah pengganti pemerintah. Terlalu sering muncul harapan bahwa *civil society* adalah suatu obat mujarab, namun bukti menunjukkan dengan jelas bahwa negara mempunyai

peran kunci untuk ikut mendorong pertumbuhan demokratisasi. Demokratisasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun kawan setia bagi kekuasaan negara. Negara dituntut untuk mampu menangani *civil society* begitu rupa sehingga tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Sebaliknya, kalangan *civil society* harus senantiasa menyadari bahwa sekalipun tertib demokratis tidak dapat dibina melalui kekuasaan negara, ia juga tidak dapat dibina tanpa kekuasaan negara. Memang benar, sebagaimana menjadi keyakinan banyak sarjana, *civil society* adalah musuh alamiah *otokrasi*, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain kekuasaan *arbitrer*. *Civil society* adalah bagian organik demokrasi, dan ia menurut definisinya sendiri adalah lawan rezim-rezim absolutis. Tapi mengkhawatirkan *civil society* akan mampu menumbangkan pemerintahan adalah sikap yang naif. Bahkan sebenarnya saling hubungan antara pemerintah dan *civil society* lebih sering didefinisikan dalam kerangka kerja sama ketimbang konflik. Karena itu di negara-negara dengan susunan kekuasaan tidak demokratis, kita perlu adanya strategi-strategi yang halus. Kita memerlukan suatu kerangka yang memberi peluang kepada warga masyarakat untuk mengikat tali hubungan dengan pemerintah pada suatu saat, dan pada saat yang lain mungkin mengendorkan atau malah melepaskan ikatan itu, namun dengan tanggung jawab. Tapi kita juga perlu pada ruang bagi adanya ikatan antara negara dan *civil society* baik yang sejalan maupun yang bersimpang jalan. Dan dari segi kepraktisan, tidaklah realistis mengharap serikat-serikat kewargaan untuk memikul tugas oposisi dalam konteks negara yang penguasanya sering menyamakan antara oposisi dan pembangkangan atau pengkhianatan. Diperlukan strategi-strategi yang lebih lembut daripada konfrontasi.

Reformasi, Liberalisasi dan Stabilitas

Pemerintah tetap amat penting bagi proyek reformasi politik, dan reformasi politik adalah vital bagi jaminan stabilitas. Di sini

bukanlah stabilitas dalam makna statis mana pun, karena jelas sekali bahwa berbagai masalah yang dihadapi banyak pemerintah negara-negara berkembang seperti Indonesia — misalnya, tidak adanya efisiensi, dasar legitimasi yang terus merosot, dan korupsi — tidak dapat disingkirkan begitu saja. Sebaliknya, reformasi politik harus mendukung stabilitas dinamis yang berarti bahwa *civil society* harus diberi ruang untuk bernafas lega melalui pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen akan kebebasan-kebebasan asasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat.

Berkaitan dengan itu, dapat diamati banyaknya pemimpin politik yang bersedia melakukan liberalisasi, namun sedikit sekali yang bersedia melakukan dan mendukung demokratisasi. Liberalisasi mengacu hanya pada tindakan perbaikan untuk membuka jalan keluar bagi kebebasan menyatakan pendapat, membatasi pelaksanaan kekuasaan yang arbitrer, dan membiarkan tumbuh serikat-serikat politik, hal mana tentu saja tidaklah terlalu buruk. Tapi sebaliknya, demokratisasi, yaitu pemilu-pemilu yang benar-benar bebas, partisipasi rakyat umum dalam kehidupan politik, serta — dalam bahasa yang gamblang — melepaskan belenggu yang membatasi kebebasan orang banyak atau massa, tidak terjadi dengan sungguh-sungguh. Kesediaan melakukan liberalisasi dalam artian tersebut itu karena diduga, dan diharap, dapat mempertinggi tingkat kesuksesan kekuasaan, karena itu mengukuhkan legitimasinya; sementara demokratisasi dihalangi karena secara keliru diduga, dan dikhawatirkan, akan merongrong pemerintahan. Inilah tantangannya.

Masalah-masalah Penting Lain

Berikut ini adalah beberapa persoalan yang sedang dan akan mewarnai wacana nasional tentang sosial-politik dan agenda reformasi yang dikehendaki oleh kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh. Gejala-gejala yang timbul, sebagaimana telah diisyaratkan

di atas, harus dibaca sebagai dampak positif (terpenting) tingkat kecerdasan umum yang semakin tinggi dan kenaikan kemampuan ekonomi rakyat umum sebagai hasil pembangunan nasional.

1. Reformasi Damai namun Prinsipil

Penolakan atas adanya perubahan radikal dan revolusioner tidak saja didasarkan pada trauma-trauma masa lalu yang masih mencekam, tapi juga karena pertimbangan bahwa suatu perubahan yang radikal merusak aset-aset positif yang telah berhasil dibangun. Jadi setiap perubahan harus damai. Tetapi juga harus prinsipil, dalam arti bahwa perubahan dalam rangka reformasi atau perbaikan itu harus menyangkut hal-hal yang fundamental, bukan perubahan tambal-sulam yang mengecoh. Contoh masalah prinsipil itu ialah hal-hal yang sekalipun terbukti efektif namun sesungguhnya melanggar ketentuan konstitusi, karena dahulu diambil sebagai tindakan darurat menghadapi taruhan kenegaraan yang besar seperti bahaya PKI dan Komunisme serta nasionalisme radikal.

2. Konstitusionalisme

Bersangkutan dengan reformasi damai itu ialah paham menegakkan konstitusi. Orde Baru sendiri telah mencanangkan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Tapi karena tampaknya hal itu menyangkut penafsiran nisbi terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional, maka dalam masyarakat tetap terasa adanya sikap tidak puas, bahkan menyalahkan. Reformasi damai harus dengan menegakkan konstitusi secara demokratis (dalam hal ini, partisipasi harus dibuka seluas mungkin kepada masyarakat), dengan kemungkinan penyempurnaan batang-tubuh konstitusi itu sendiri melalui amandemen-amandemen.

3. Tertib Hukum dan “*Predictability*”

Benar atau tidak materi permasalahannya, ramainya isu kolusi di kalangan penegak hukum di negeri kita ini menunjukkan adanya

kelemahan dalam tertib hukum. Kolusi itu sendiri mungkin hanya sebagai akibat. Sedangkan sebabnya ialah suasana umum lemahnya prinsip tertib hukum itu sendiri dalam kehidupan kenegaraan kita sebagaimana yang sering menjadi sinyalemen masyarakat. Tertib hukum akan berdampak positif terhadap produktivitas perorangan maupun masyarakat, karena adanya kemantapan berdasarkan *predictability* yang dihasilkan oleh pelaksanaan ketentuan hukum secara konsiten.

4. Masalah Akhlak atau Etika dan Moral

Banyak tinjauan dari luar (yang tidak begitu saja kita tolak secara ksenofobik — *xenophobic*) yang mengatakan bahwa negeri kita adalah negeri yang secara etis dan moral sosial-politik dan ekonomi termasuk lunak. Gejala kelunakan itu dapat dilihat pada bagaimana kita menangani perkara kriminal seperti masalah korupsi. Keteguhan akhlak memerlukan komitmen pribadi pada nilai-nilai agama, yang dalam banyak hal kita yakini bahwa keagamaan adalah salah satu ciri utama bangsa kita. Tetapi kenyataannya banyak terjadi hal ironis, salah satunya ialah, Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di muka bumi namun juga merupakan negeri yang paling besar korupsinya. Dan lebih ironis lagi, sementara banyak “kader” Islam yang berhasil tampil sebagai *Mr Clean*, namun bukan lagi rahasia bahwa ada pula di antara mereka yang mungkin harus disebut *Mr Dirty* atau *Mr Corrupt* yang menumpuk kekayaan pribadi secara tidak halal melalui posisinya yang “basah”.

5. Pengawasan Sosial

Karena masalah etika dan moral (termasuk dikaitkan dengan ajaran agama) pada analisa terakhir adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang luar, maka tegaknya nilai-nilai etis dan moral itu dalam masyarakat memerlukan tidak saja komitmen dan iktikad baik pribadi (hal mana tidak dapat dicek dari luar), tetapi lebih-lebih lagi memerlukan pengawasan sosial. Dengan begitu

pandangan etika dan moral yang bersifat pribadi tersebut secara kolektif antara para anggota masyarakat menjadi kenyataan etis dan moral yang tersosialisasikan dan terlembagakan.

6. Kebebasan-kebebasan Asasi

Pengawasan sosial akan berjalan secara efektif jika terlaksana kebebasan-kebebasan asasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Makna prinsip-prinsip itu tidak lagi perlu dirinci di sini, karena sudah merupakan pengetahuan umum. Namun dua hal yang patut dicatat, pertama yang positif berupa kebebasan akademik yang relatif cukup baik di negeri kita; kedua yang negatif, yaitu kebebasan menyatakan pendapat secara umum, termasuk kebebasan pers, yang jauh dari mantap dan penuh percaya diri. Demikian pula halnya dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. Semua kebebasan-kebebasan asasi tersebut harus terus ditingkatkan, dan reformasi sosial-politik menghendaki agar segi-segi positif tersebut didorong lebih lanjut agar benar-benar meningkat.

7. Andalan kepada Sistem dan Struktur, bukan Sejajar dengan Andalan

Salah satu hasil yang diharapkan dari tegaknya konstitusi, tertib hukum, pengawasan sosial, dan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi ialah berkembangnya dan meningkatnya kehidupan kenegaraan kita dari lebih berat ke andalan pribadi pemimpin menuju ke lebih berat andalan struktur dan sistem yang obyektif. Semua negara berkembang dengan sendirinya termasuk Indonesia, pada tahap-tahap awal pertumbuhannya memerlukan figur sentral yang kuat dan bijak, yang berfungsi sebagai bapak bangsa seperti Bung Karno dan Pak Harto. Tetapi kini pola kepemimpinan penuh kebapakan (paternalistik) itu, sejalan dengan proses kemajuan bangsa di segala bidang, telah digantikan dengan pola kepemimpinan oleh seorang tokoh “yang pertama dari yang sama” (*primus inter pares*). Karena

itu, pola kepemimpinan saat ini memerlukan kekuatan struktur dan sistem. Pangalaman tragis bekas Yugoslavia menunjukkan apa akibatnya jika bangsa itu tidak siap ditinggalkan oleh bapaknya, karena kuatnya andalan pada pribadi sang pemimpin dan lemahnya andalan pada struktur dan sistem yang obyektif. Bangsa Indonesia, mengingat realitas kemajemukan yang luar biasa di segala bidang, mutlak memerlukan persiapan dan kemampuan yang matang dan mantap untuk menyongsong pola kepemimpinan ini.

8. Keadilan Kekuasaan

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung curang, dan kekuasaan mutlak curang secara mutlak pula), begitu bunyi sebuah ungkapan yang sudah diterima secara universal sebagai kebenaran sederhana. Karena itu kekuasaan mutlak harus diawasi dan diimbangi. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa sistem dan hukum perimbangan di kalangan masyarakat manusia adalah Sunnatullah (hukum Allah) yang berjalan untuk menjaga kelestarian bumi (*“Kalau tidaklah Allah menahan manusia satu bagian dengan bagian lain, maka pastilah bumi rusak,”* [Q 2:251]). Mekanisme perimbangan kekuatan itu menjadi dasar semua tatanan keadilan, yang jika manusia ikut serta dalam menegakkannya akan menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan bangsanya sendiri: Jika tidak, maka masyarakat itu akan “dimakan” oleh mekanisme perimbangan kekuatan yang obyektif dan langsung datang dari Tuhan sehingga tidak mungkin ditawar atau apalagi ditahan. Maka Allah mengutus guru kebenaran kepada setiap bangsa tanpa kecuali, selaku Rasul-Nya, dengan mengemban tugas suci menegakkan keadilan itu dengan tunduk hanya kepada Allah, sumber keinsafan keadilan, dan menentang pelaku kezaliman otoritarianisme, kemudian Allah memberi pahala kebahagiaan kepada yang taat dan menurunkan azab kesengsaraan dan kenistaan kepada yang menentang (Q 16:36). Oleh karena itu kekuasaan dan keadilan harus berjalan serempak.

Sebab itu, masalah kekuasaan yang lebih adil atau keadilan yang lebih tinggi dalam sistem kekuasaan harus merupakan salah satu agenda reformasi yang mendominasi wacana sosial-politik tanah air kita sekarang ini. [❖]